

LKJIP

2024



BPBD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Lamongan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan, yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban visi, misi dan tujuan organisasi. LKjIP ini sekaligus merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan strategik yang ditetapkan tersebut dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang diharapkan tercapai.

Penyusunan LKjIP BPBD ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP BPBD Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BPBD Kabupaten Lamongan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP BPBD Kabupaten Lamongan ini telah dapat mencerminkan kinerja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2024.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga BPBD Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik - baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

**Pit. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
C. DATA UMUM ORGANISASI.....	7
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP.....	14
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.....	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	22
BAB III.....	30
AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	30
B. REALISASI ANGGARAN.....	44
BAB IV.....	48
PENUTUP.....	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	49

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan Lingkungan Hidup atas penyelenggaraan Badan Lingkungan Hidup. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan periode tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut:

1. Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2024 telah dapat direalisasikan dengan

baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Camat dan staf Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait

2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2024 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu tahun 2021-2026 akan difokuskan pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKJIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, BPBD Kabupaten Lamongan adalah Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BPBD Kabupaten Lamongan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

1. Tugas BPBD

BPBD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggaulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi yang adil dan setara, sesuai dengan kebijakan Pemerintah, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

2. Fungsi BPBD

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana termasuk Bencana Kebakaran;
- c. Penyusunan pedoman Operasional terhadap Penanggulangan Bencana;
- d. Penyampaian Informasi kegiatan Penanggulangan Bencana pada Masyarakat.
- e. Penggunaan dan Pertanggung jawaban sumbangan / bantuan.
- f. Pelaporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, maka bersama ini disajikan Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan secara ex-Officio sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah
- b. Anggota masyarakat profesional dan ahli

Unsur Pengarah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

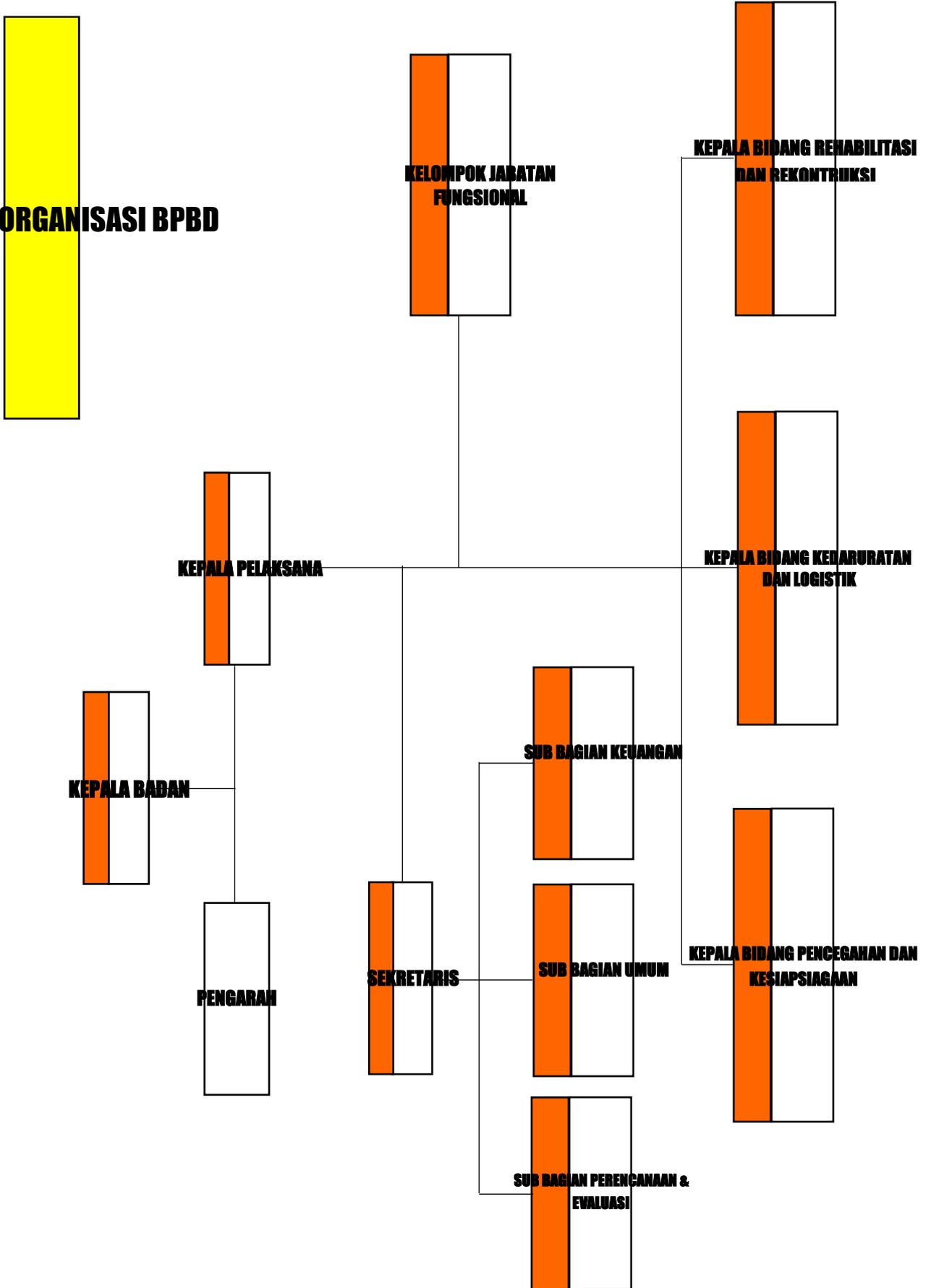
3. Unsur Pelaksana

a. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

b. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- Kepala Pelaksana
- Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BPBD



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan . Susunan Organisasi/Personil BPBD terdiri dari :

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Adapun data personil BPBD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Ket.
1.	JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP	Pit Kepala Pelaksana	
2.	GUNAWAN, SE	Sekretaris	
3.	SUKIRNO, S.H	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
4.	MARTANTI P , S.Sos.,M.M	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	
5.	NURASAN, S.Sos	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
6.	IRFAN HARIADI,S.T	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	
7.	PEPEN TEGUH A,S.Sos	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	
8.	NASIKIN,S.Sos	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	
9.	KUNTJORO,S.E.,M.M	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	
10.	FITRIASIH, S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	

No	Nama	Jabatan	Ket.
11.	AINIS YUNITA DEWI,S.E.,M.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
12.	R. PRIMADINI LESTARI, S.Psi, MM	Kepala Sub Bagian Keuangan	
13.	MUSTARI, SE	Staf	
14.	SLAMET PRAMONO	Staf	
15.	RR MASHITA F, S.Si	Staf	
16.	SUKAERI	Staf	
17.	ABI FITRIANSYAH,S.E	Staf	
18.	AGUS SUTOMO	Tenaga Administrasi	
19.	LILIK MURTOMO	Tenaga Administrasi	
20.	MOCH FARID NURCAHYO	Tenaga Administrasi	
21	INDRA SUSANTO	Tenaga Administrasi	
22.	DITA SETIAWAN, SP	Tenaga Administrasi	
23.	RINA APRILIA, SPD	Tenaga Administrasi	
24.	SAIFUDDIN JEFRI	Tenaga Administrasi	
25.	WULAN SARI, S.Pi	Tenaga Administrasi	
26.	HAMIDAH, S.M	Tenaga Administrasi	
27.	NUR KHASANAH, SE	Tenaga Administrasi	
28.	MUHAMMAD ABDUL GHOFUR	Tenaga Administrasi	
29.	RESTU INDRA NURANI, SH	Tenaga Administrasi	
30.	ASTRID VALERINA L.S	Tenaga Administrasi	
31.	ARDA DIYA ABIEUKA	Tenaga Administrasi	
32.	BAYU PAMUNGKAS	Tenaga Administrasi	
33.	ANDI WALUYO	Tenaga Administrasi	
34.	GILANG FRISMA N.P	Tenaga Administrasi	
35.	KISWANTORO	Tenaga Administrasi	
36.	MOCH HENDRO BUDI S.	Tenaga Pengemudi	
37.	EDI SHOBIRIN	Agen Bencana	
38.	AHMAD FARID RIZKY	Agen Bencana	

2. Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur dan semakin meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan khususnya dalam penanggulangan bencana serta dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lamongan, maka diperlukan adanya sarana dan

prasarana yang dimiliki, adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Daftar Kendaraan Dinas dan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
I.	Kendaraan Dinas	
	1. Kendaraan Dinas Roda 4	
	- Kendaraan Dinas Eselon II	1 Unit
	- Kendaraan Dinas Eselon III	3 Unit
	2. Kendaraan Dinas Roda 2	
	- Kendaraan Dinas Eselon IV	6 Unit
II.	Kendaraan Operasional	
	1. Kendaraan Operasional Roda 6	
	- Truk Tangki Air	5 Unit
	- Truk Logistik 1 Unit	1 Unit
	2. Kendaraan Operasional Roda 4	
	- Mobil Rescue	1 Unit
	- Mobil pick Up	2 Unit
	3. Kendaraan Operasional Roda 3	
	- Tossa	2 Unit
	4. Kendaraan Operasional Roda 2	
	- Motor Trail	12 Unit

Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No.	Uraian	Jumlah
1.	Almari	22 Unit
2.	Almari Arsip/ Rak Arsip	3 Unit
3.	Filling Cabinet	15 Unit
4.	Kursi Lipat	115 Unit
5.	AC	24 Unit
6.	Televisi	1 Unit
7.	Tangga Lipat	1 Unit
8.	PC	19 Unit
9.	Notebook	14 Unit
10.	Printer	25 Unit
11.	Meja Kerja Eselon II	2 Unit
12.	Meja Kerja Eselon III	8 Unit
13.	Meja Kerja Eselon IV	12 Unit
	Meja Non Struktural	25 Unit
14.	Meja Kerja Staf	19 Unit
15.	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit
16.	Kursi Kerja Eselon III	4 Unit
17.	Kursi Kerja Eselon IV	11 Unit
18.	Kursi Staf	30 unit
19.	Kamera	8 Unit
20.	Handycam	5 Unit
21.	LCD Proyektor	1Unit
22.	HT	10 Unit
23.	Wireless (Wireles Adapter)	10 Unit
24.	Stabilisator (UPS / Stabilizer)	1 Unit
25.	Camera Video (Kamera Drone)	1 Unit

No.	Uraian	Jumlah
26	Router (Router / Switch Waireles)	3 Unit
27	Unit Transceiver VHF Portable (Radio RIG)	1 Unit
28	Unit Transceiver UHF Stationary (Radio Repeater)	1 Unit
29	CCTV 6 Channel (CCTV 6 Titik)	1 Unit
30	Mast Tower (Tower Radio RIG)	1 Unit
31	Perahu Penumbang (Perahu Rakit)	3 Unit
32	Mesin Bor (Bor Listrik)	1 Unit
33	Mesin Kompresor (kompresor Angin)	1 Unit
34	Mesin Kompresor (Kompresor Air)	1 Unit
35	Mesin Las Listrik (Peralatan las listrik)	1 Unit
36	Lain-lain (EWS BANJIR TELEMETRI (SMS GATE WAY))	1 Unit
37	Mesin Absensi (Mesin Absensi)	1 Unit
38	Lain-lain (Jaket Pelampung)	20 Unit
39	Modem (Modem)	2 Unit
40	Sound System (Sound System)	1 Unit
41	Faximile	1 Unit

3. Pembiayaan

Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2024, dalam pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Lamongan memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.160.167.232
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.720.167.232
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	440.000.000

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Perangkat Daerah Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.160.167.232
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.720.167.232
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.584.011.952
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.564.011.952
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.104.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.612.200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.969.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.683.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.369.700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.410.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.060.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.199.560
Pengadaan Mebel	7.219.440
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.980.120
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.131.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.900.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.167.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.720.120
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.687.520
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.305.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.727.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	440.000.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	46.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	46.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	209.000.000
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	32.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22.000.000
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	145.000.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	16.380.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.994.000

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.626.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	40.000.000
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000
Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	25.000.000

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan pada Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis BPBD Kabupaten Lamongan, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kerja,

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024,

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Lamongan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.

Bab IV – Penutup,

menjelaskan simpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran – melampirkan tabel RKT, Evaluasi Renja, Rencana Aksi, monitoring rencana aksi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2025. Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2026 serta RPJM Nasional Tahun 2005-2025 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026 adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Misi 3.

1. Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan layanan infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, kelestarian lingkungan hidup daerah dan meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana.

2. Sasaran dan indikator kinerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2022-2026 adalah:



B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Dengan memperhatikan rancangan awal dan berpedoman pada Renstra, BPBD Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun kemudian BPBD Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran.

Keterkaitan antara Renja dan RKA adalah RKA memuat informasi yang tertuang dalam Renja, termasuk informasi alokasi pendanaan yang telah dimutakhirkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah (*resources envelope*). Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Lamongan, dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

1. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan dana yang bersumber dari APBD Daerah Kabupaten Lamongan dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	PROGRAM	KEGIATAN
Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

				<p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
				<p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				<p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

				<p>4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
				<p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Pengadaan Mebel</p> <p>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
				<p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka</p> <p>3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
				<p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<p>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana) <p>Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 5. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Presentase korban terdampak bencana yang ditangani	Program Penanggulangan Bencana	<p>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik

				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 4. Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang dilaksanakan		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Lamongan ini memuat dua unsur pokok, yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a) Konsistensi, keselarasan dan proporsionalitas dalam menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) ke dalam penetapan prioritas program /kegiatan dan alokasi anggaran.
- b) Ketepatan dalam merumuskan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja.
- c) Ketepatan dalam mengestimasi target kinerja dari setiap indikator kinerja.
- d) Obyektivitas dalam pengukuran kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi, maka dibutuhkan penetapan kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah organisasi.

Tujuan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan adalah untuk meningkatkan “Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana” dengan indikator kinerja “ Indeks Ketahanan Daerah”. Untuk mencapai tujuan dimaksud telah ditetapkan sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diperjanjian dengan Bupati Lamongan. Adapun Perjanjian Kinerja Camat Lamongan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan
 - Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDDP) Tahun 2022-2026, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan Rencana Kinerja Tahun 2023. Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	74%
		Presentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	100%
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang Dilaksanakan	100%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86,02

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85,50

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	5 Dokumen

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket
2	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Presentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	10 Paket
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor Yang Dipenuhi	5 Paket
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	5 Paket
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen
6	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
7	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayarkan	4 Rekening
8	Tercukupinya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit
9	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Peralatan dan Perlengkapan yang Dipelihara	7 Unit
10	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tenaga Kebersihan Tenaga Supir	12 Laporan
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prsentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit
13	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit

14	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitas Gedung	1 Unit
----	--	---------------------------	--------

Sub Bagian Keuangan

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase gaji dan tunjangan yang di terima pegawai BPBD	100 %
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semester yang disusun	2 Dokumen

Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pecegahan dan Kesiapsiagaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Mitigasi Bencana	Persentase Desa Tangguh Yang terbentuk	100%

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Desa yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3 SPAB
2	Terlaksannaya Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan

3.	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan
----	--	--	-----------

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 Warga
2.	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan
3.	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Pada saat tanggap darurat	Persentase Kejadian Bencana Yang ditangani	100%

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	48 Orang

2	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang
4	Terlaksananya Penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang

Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana Yang ditangani	100%

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan
2.	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan serta secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, dengan Skala Pengukuran Ordinal, yaitu :

85 – 100	:	Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - < 85	:	Baik / Berhasil
55 - < 70	:	Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55	:	Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Dari 2 (dua) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan adalah Sangat baik / Sangat berhasil, dengan *hasil indikator kinerja* rata-rata sebesar **100 %**. Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat dari analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi BPBD memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan Kabupaten pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Kinerja tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dimana IKD (Indeks Ketahanan Daerah) yang menjadi indikator tujuan dengan target 0,64 terealisasi sebesar 0,64 atau tercapai 100%. Capaian ini didukung oleh tercapainya indikator sasaran dan kinerja pendukung. Adapun capaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencan	74%	74%	100%
		Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani	100%	100%	100%
		Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,70	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Adapun rincian Indikator Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Tahun 2024 sebesar 0,64 % dan terealisasi 0,64% Sehingga capaian 100%.

Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana

Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana merupakan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Presentase Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana pada Tahun 2024 sebesar 74 % dan telah terealisasi sebesar 74% sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani

Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani merupakan merupakan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Presentase Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani pada Tahun 2024 sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan

Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan merupakan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100% sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai sakip perangkat daerah merupakan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nilai sakip perangkat daerah memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Nilai Sakip Perangkat Daerah pada Tahun 2024 sebesar 87.70 % dan belum terealisasi menunggu data dari Inspektorat.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 4 (Empat) indikator Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai/ melampaui target yang ditetapkan tidak lepas dari pencapaian kinerja pegawai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, mulai sekretaris BPBD, Kabid dan pejabat fungsional. Adapun pencapaian kinerja pendukung antara lain sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1.	IKM	86,00	86,05	100%

2. Perbandingan realisasi kinerja

No	Sasaran	Indikator	2023	2024	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencan	70%	74%	100%
		Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani	100%	100%	100%
		Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87,94	-	-

1. Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana

Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana,

- Tahun 2023

Rencana pembentukan desa tangguh 4 desa dan terlaksana keseluruhannya yaitu 4 desa, sehingga telah memenuhi target 100%

- Tahun 2024

Rencana pembentukan desa tangguh 3 desa dan terlaksana keseluruhannya yaitu 3 desa, sehingga telah memenuhi target 100%

2. Pengendalian bencana alam saat tanggap darurat tahun 2024 lebih cepat tercapainya dibandingkan Tahun 2023 oleh karena :

a) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung baik sarana mobilitas dan alat penanganan saat tanggap darurat :

- Bertambahnya alat SAR
- Bahan – bahan logistik lainnya

- b) Kesiapan Tenaga Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan saat terjadi bencana karena didukung adanya pelatihan – pelatihan baik yang diadakan sendiri dan eksepsi ke kabupaten, propinsi dan pusat.
- c) *Leadership* / kepemimpinan pada level top manager sampai dengann bawahan lebih terorganisasi dengan baik.
- d) Perencanaan program dari *bottom up* / masukan dari bawah yang diakomodasi melalui program – program kegiatan

3. Pengendalian bencana alam pasca bencana sangat ditentukan oleh tahapan pengendalian bencana mulai prabencana saat bencana dan pasca bencana ;

- a) Pada tahun 2023, keterpaduan antara pengendalian bencana saat pra bencana sampai pasca bencana kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga kegiatan yang dilakukan bersifat parsial. Sedangkan Tahun 2024 pengendalian pasca bencana lebih sinergi antar bidang sehingga program dan kegiatan lebih berhasil.
- b) Pada Tahun 2023 Informasi kebencanaan belum dilaksanakan secara massiv, sedangkan Tahun 2024 informasi kebencanaan lebih massiv dan terdapat aplikasi pasca bencana yakni INARISK, dengan aplikasi ini nilai kerentanan bencana (Indeks bencana) bobot-bobot yang kurang bisa ditingkatkan / antisipasi, misalkan dengan program – program perbaikan tanggul sungai, normalisasi sungai, perbaikan saluran air dan jalan serta jembatan dapat diperbaiki kualitasnya.
- c) Pada Tahun 2023 faktor kerugian dan kerusakan akibat bencana pada tahap pasca bencana belum dapat ditentukan baik sektor pertanian, perikanan maupun kegiatan perumahan, jalan / jembatan, akn tetapi pada tahun 2024 sudah dapat diproyeksikan, sehingga koordinasi dengan OPD teknis dapat berjalan dengan baik.
- d) Pada Tahun 2023 monitoring terhadap kerusakan pasca bencana belum dilakukan secara koordinatif dan parsial, sedangkan pada tahun 2024 dilakukan secara koordinatif
- e)

3. Perbandingan realisasi kinerja s.d akhir periode RJMD/RENSTRA

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir Periode RENSTRA 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencan	74%	82%
		Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani	100%	100%

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir Periode RENSTRA 2026
		Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan	100%	100%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	86,04

Kinerja tahun 2024 telah diatas target akhir periode RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan Tahun 2021-2026, sehingga untuk penetapan target tahun yang akan datang akan ditetapkan diatas realisasi Tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencan	74%	-
		Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani	100%	-
		Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan	100%	-
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-

5. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja. Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024 antara lain :

- a. Tersedianya jumlah aparatur yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja.
- b. Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik (rata-rata berpendidikan S1).
- c. Adanya struktur organisasi perangkat daerah dan pembagian tugas dari masing - masing bidang yang jelas.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing – masing bidang.
- e. Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur.
- f. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024 yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Capaian kinerja pada tahun 2024 berdasarkan indikator tujuan sebagai berikut:

a. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Tahun 2024 sebesar 0,64 % dan terealisasi 0,64% Sehingga capaian 100%.

b. Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana

Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana merupakan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Persentase Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana pada Tahun 2024 sebesar 74 % dan telah terealisasi sebesar 74% sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

c. Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani

Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani merupakan merupakan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Persentase Presentase Korban terdampak bencana

yang di tangani memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Presentase Korban terdampak bencana yang di tangani pada Tahun 2024 sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

d. Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan

Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan merupakan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Presentase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100% sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

e. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai sakip perangkat daerah merupakan indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nilai sakip perangkat daerah memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026. Target Nilai Sakip Perangkat Daerah pa pada Tahun 2024 sebesar 87.70 % dan belum terealisasi menunggu data dari Inspektorat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- a. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
- b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
- c. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Faktor penentu efisiensi adalah :
 - 1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.

- 3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- 4) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Salah satu cara sederhana untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, dana/anggaran dan sarana prasarana) dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut :

Alokasi Anggaran per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	3.720.167.232	3.478.579.966	93,51
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	440.000.000	435.008.000	98,86
		Presentase Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani			
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang Dilaksanakan			

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	-	93,51	
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Presentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	74	98,86	1,14
		Presentase Korban Terdampak Bencana Yang Ditangani	100		
		Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang Dilaksanakan	100		

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.720.167.232,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.478.579.966,00 atau sebesar 93,51% adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 40.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi perencanaan dan evaluasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 38.782.600,00 atau 96,96 % dan fisik 100 %.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.685.900,00 atau 96,86 % dan fisik 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.767.700,00 atau 97,68 % dan fisik 97,68 %.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 20.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.329.000,00 atau 96,65 % dan fisik 100 %.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 2.584.011.952,00 dipergunakan untuk memenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.383.448.245,00 atau 92,24 % dan fisik 100%.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi Rp. 2.564.011.952,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.363.448.645,00 atau 92,18 % dan fisik 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi Rp. 10.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Penyusunan Laporanm Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.999.600,00 atau 99,98 % dan fisik 100 %.

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi Rp 127.104.600,00 dipergunakan untuk memenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 123.667.748,00 atau 97,30 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi Rp9.612.200,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.612.200,00 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi Rp. 4.969.300,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.969.300,00 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi Rp. 33.683.400,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 33.657.400,00 atau 99,92 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi Rp. 15.369.700,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.369.650,00 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi Rp17.410.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.400.000,00 atau 82,71% dan fisik 100 %.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi Rp. 46.060.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 45.659.198,00 atau 99,13 % dan fisik 100 %.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi Rp. 18.199.560,00 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 16.204.000 atau 89,04 % dan fisik 100 %.
- Pengadaan Mebel dengan alokasi Rp. 7.219.440,00 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Mebel. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.504.000,00 atau 90,09 % dan fisik 100 %.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi Rp. 10.980.120,00 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 9.700.000,00 atau 88,34 dan fisik 100 %.

- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi Rp. 617.131.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 584.786.483,00 atau 94,76 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi Rp. 584.786.483,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 90.941.823,00 atau 82,00 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi Rp. 10.167.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.167.000,00 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi Rp. 496.064.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 483.677.660,00 atau 97.50 % dan fisik 100%.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi Rp. 333.720.120,00 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 331.690.890,00 atau 99,39% dan fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi Rp56.687.520,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 55.966.800,00 atau 98,73 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi Rp. 65.305.600,00 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 96.017.300,00 atau 99,56 % dan fisik 100 %.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi Rp. 11.727.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 96.017.300,00 atau 99,86% dan fisik 100%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi Rp. 200.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 198.996.790,00 atau 99,50% dan fisik 100 %.

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 435.008.000,00 atau sebesar 98,87% adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 46.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 45.200.000,00 atau 98,26% dan fisik 100 %.
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.000.000,00 Yang dipergunakan untuk Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) di 3 Sekolah (SMPN 1 Laren, SMPN 1 Karangbinangun dan SMPN 1 Lamongan), Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.45.200.000,00 atau 98.26%, Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan alokasi Rp. 209.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 205.144.000,00 atau 98,16% dan fisik 100%
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.000.000,00 dipergunakan untuk 1 kegiatan pengelolaan risiko bencana dan terlaksananya penguatan kapasitas di 1 Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.650.000,00 atau 95.78%, Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00 dipergunakan untuk 100 Warga warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100%, sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00 dipergunakan untuk 12 Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100%, Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 Yang dipergunakan 10 Orang Personil TRC yang dikembangkan kapasitas Teknis dan Manajerialnya, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100% Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan alokasi dana sebesar Rp. 22.000.000,00 Yang dipergunakan untuk 100 Warga Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 22.000.000,00 atau 100%, Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
 - Pengelolaan Rkegiatano Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 yang dipergunakan BIMTEK IKD 45 Orang, adapun realisasinya Rp. 97.494.000,00 atau 97,49% sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
- c. Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan alokasi Rp. 145.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 145.000.000,00 atau 98,89% dan fisik 99,89%
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.380.000,00 yang dipergunakan untuk Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 16.380.000,00 atau 100%. Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.994.000,00 dipergunakan untuk melakukan Pencarian dan Evakuasi Korban Per jenis Bencana. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.994.000,00 atau 100% Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,00.yang dipergunakan untuk belanja belanja bahan banjiran (bongkotan 300 Batang, gedeg guling 750 m, 1500 Karung dan belanja Air Bersih 250.000 Liter. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.980.000,00 atau 99,98%. Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan alokasi Rp. 40.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 98,55% dan fisik 100%.
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 yang dipergunakan untuk Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100%. Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%
 - Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00 yang dipergunakan 18 Paket bantuan material. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 24.818.000,00 atau 99,27%. Sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

LKJIP BPBD Kabupaten Lamongan menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Sebagai lembaga di daerah yang disertai tugas untuk melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana maka tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah di Bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapun Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh BPBD Kabupaten Lamongan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan tahun 2024 sebesar Rp. 4.160.167.232,00 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 3.913.587.966,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 94,07 %, adapun rincian penggunaan anggaran :

Perangkat Daerah / Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.160.167.232	3.913.587.966	94,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.720.167.232	3.478.579.966	93,51
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	440.000.000	435.008.000	98,87

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Perangkat Daerah Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.160.167.232	3.913.587.966	94,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.720.167.232	3.478.579.966	94,07
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	38.782.600	96,96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.685.900	96,86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.767.700	97,68
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.329.000	96,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.584.011.952	2.383.448.245	92,24
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.564.011.952	2.363.448.645	92,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	9.999.600	94,07
Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.104.600	123.667.748	97,30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.612.200	9.612.200	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.969.300	4.969.300	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.683.400	33.657.400	99,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.369.700	15.369.650	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.410.000	14.400.000	94,07

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.060.000	45.659.198	99,13
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.199.560	16.204.000	89,04
Pengadaan Mebel	7.219.440	6.504.000	90,09
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.980.120	9.700.000	88,34
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.131.000	584.786.483	94,76
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.900.000	90.941.823	82,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.167.000	10.167.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	496.064.000	483.677.660	97,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.720.120	331.690.890	99,39
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.687.520	55.966.800	98,73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.305.600	65.017.300	94,07
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.727.000	11.710.000	99,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.996.790	99,50
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	440.000.000	435.008.000	98,87
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	46.000.000	45.200.000	98,26
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	46.000.000	45.200.000	98,26

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	209.000.000	205.144.000	98,16
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	32.000.000	30.650.000	95,78
Pelatihan Pencegahan dan Mtigasi Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22.000.000	22.000.000	100
Pengelolaan Rkegiatano Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	97.494.000	97,49
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	145.000.000	144.846.000	99,89
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	16.380.000	16.300.000	99,51
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.994.000	14.940.000	99,64
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.980.000	99,98
Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	13.626.000	13.626.000	100
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	40.000.000	39.818.000	99,55
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	100
Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	25.000.000	24.818.000	99,27

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang baik.

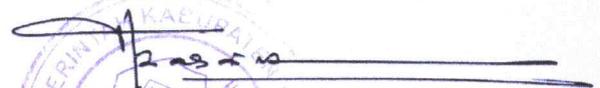
Namun demikian, disadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Namun seluruh komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja melalui berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta inovasi dalam pelayanan publik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas kerja keras dan dedikasinya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Lamongan, Januari 2025

**Pit KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**




JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

MISI 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan

SASARAN : Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)	
Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran lembaga desa dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan.	Memfasilitasi terbentuknya desa tangguh bencana di daerah rawan bencana.	
			Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana.	
			Peningkatan kegiatan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana	
		Peningkatan pemulihan kerusakan pasca bencana.	Memperkuat tim JITUPASNA.	
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Peningkatan Koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Teknis/Tekait dan pihak Swasta.
				Penyiapan Struktur dan Mekanisme Komando Tanggap Darurat.
			Peningkatan Koordinasi multi pihak saat status keadaan darurat.	Penyiapan logistik dan tempat evakuasi korban bencana.
				Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran
		Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala.		

TABLE LINEARITAS ARAH KEBIJAKAN RPJMD DENGAN RESTRA PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2023	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas dan Jumlah Desa Tangguh Bencana	Memfasilitasi terbentuknya desa tangguh bencana di daerah rawan bencana.	√	√	√	√	√
		Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana.	√	√	√	√	√
2	Optimalisasi Mitigasi Bencana	Peningkatan kegiatan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana	√	√	√	√	√
		Memperkuat tim JITUPASNA.	√	√	√	√	√
3	Optimalisasi Penanganan Bencana	Penyiapan Struktur dan Mekanisme Komando Tanggap Darurat.	√	√	√	√	√
		Penyiapan logistik dan tempat evakuasi	√	√	√	√	√

		korban bencana					
4	Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam penanganan bencana	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Teknis/Tekait dan pihak Swasta.	√	√	√	√	√